

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Draise, Nurlan. 2009. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Pt. Indeks
- Husaini, U. (2008). *Manajemen: Teori, Praktik dan Riset Pendidikan*. In *SCMS Journal January-March 2008*.
- Sedarmayanti. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. In *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*.
- Siregar. (2014). *Manajemen Aset (Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dalam Konteks Kepala daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi dan Otonomi Daerah)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Siyoto S, A. S. (2015). *Dasar metodologi penelitian*. In *Literasi Media Publishing*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. In *METODE PENELITIAN ILMIAH*.
- Yusuf, M. (2010). *Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*. Salemba Empat

Sumber Jurnal

- Aira, A. (2014). *Peran Manajemen Aset dalam Pembangunan Daerah*. *Penelitian Sosial Keagamaan*, 17(1), 21–39. <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=293919>
- Arifuddin, D. A. (2012). *Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Pengendalian Biaya Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Boyolali*. *Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 66(December), 37–39.
- Avianty, D. N., Jatmika, A. H., & Ulum, L. M. (2020). *Sistem Informasi Manajemen Aset Pada Bpkad Provinsi Nusa Tenggara Barat Berbasis Website Dengan Framework Laravel*. *Jurnal Begawe Teknologi Informasi (JBegaTI)*, 1(1), 44–55. <https://doi.org/10.29303/jbegati.v1i1.155>
- Basuki, K. (2019). *Manajemen Aset Daerah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Mobil Dinas)*. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online*

Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9), 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id

- Indra, T. P. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Aset Tetap Terhadap Keandalan Laporan Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. *Вестник Росздравнадзора, 4*, 9–15.
- Irawanti, R. E., & Asrida, W. (2014). *Pengelolaan Aset Daerah Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Indragiri Hilir*. 1–13.
- Lasturi, D. H., & Sunaningsih, S. N. (2021). Implementasi Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Magelang. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 4*(1), 9–14. <https://doi.org/10.32500/jematech.v4i1.1404>
- Lewedalu, G. D., Kalangi, L., & Warongan, J. D. L. (2016). Evaluasi Penatusahaan, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *Going Conern: Jurnal Riset Akuntansi, 66–73*.
- Mokodompit, D., Morasa, J., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,” 8*(1), 43–52. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15308>
- Pratama, M. R., & Pangayow, B. (2016). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pengelolaan aset Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah, 2*(2), 1–12.
- Riyanti, G. (2014). *Analisis Penatausahaan Dan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bulungan*.
- Rotty, A. T., Kalangi, L., & Lambey, L. (2020). Determinan Akurasi Pelaporan Aset Tetap Daerah Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. ... *Riset Akuntansi Dan ...*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/28643>
- Setiawan, A., & Purnamasari, A. I. (2019). Pengembangan Smart Home Dengan Microcontrollers ESP32 Dan MC-38 Door Magnetic Switch Sensor Berbasis Internet of Things (IoT) Untuk Meningkatkan Deteksi Dini Keamanan Perumahan. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi), 3*(3), 451–457. <https://doi.org/10.29207/resti.v3i3.1238>
- Zulaymi, A. (2010). *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun*. <http://repository.uin-suska.ac.id/10618/>

Sumber Regulasi

Undang-Undang No.25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah dan Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 tentang Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah

Lampiran 1. Redaksi Wawancara

Nama :

NIP :

Jabatan :

Instansi :

Jenis Kelamin : **Laki-laki / Perempuan**

Pendidikan Terakhir :

Daftar pertanyaan-pertanyaan dalam proses pengambilan data melalui teknik wawancara:

1. Apa saja aset yang ada pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
2. Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan dan Pelaporan Aset pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
3. Bagaimana proses pelaksanaan Pengelolaan Aset pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
4. Bagaimana proses pelaksanaan Pelaporan Aset pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
5. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Pengelolaan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
6. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?
7. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam implementasi Pengelolaan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

8. Bagaimana mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam implementasi Pelaporan Aset Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

Lampiran 2. Hasil Wawancara Informan 1

Nama: Muhammad Adit ST

NIK: 197911082010011008

Jabatan: Kasulbat Umum Sekretariat DPRD

Instansi: Sekretariat DPRD Sulawesi Barat

Jenis kelamin: Laki-laki

Pendidikan Terakhir: S1 Teknik Arsitektur

Daftar Pertanyaan² dalam proses pengambilan data melalui wawancara:

1. Apa saja aset yang ada pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

-> Terkait aset apa yang ada dikantor Sulawesi Barat, tercatat dalam aplikasi SIMDA. Adapun aset yang berada pada kantor Sekretariat DPRD Sulawesi Barat adalah:

-Pertama:

KIB A (Kartu Inventaris Barang) yang berupa aset peralatan dan mesin

-Kedua:

KIB C (Aset gedung dan bangunan)

-Ketiga

KIB D (Aset jalan irigasi dan jembatan)

Pada KIB D hanya ada aset jalan, irigasi dan jembatan tidak ada.

-Keempat: KIB E (Aset tetap lainnya)

-Kelima: KIB L (Aset lainnya)

2.Siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan aset kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

-> Yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pelaporan aset kantor Sekretariat DPRD adalah pengurus barang. Pengurus barang yang di SK kan oleh Gubernur, pengurus barang merupakan hasil surat keputusan dari Gubernur Sulawesi Barat dibawah arahan dan perintah dari Sekretaris DPRD.

3.Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan aset kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

->Pelaksanaan proses pengelolaan aset kantor Sekretarian DPRD Provinsi Sulawesi Barat yaitu:

- Pertama pejabat atau pengurus barang membuat kartu inventaris ruangan (KIR)
- Kedua membuat surat keputusan pengguna barang milik daerah
- Ketiga membuat berita acara pinjam pakai barang milik daerah yang ada di lingkup sekretariat DPRD
- Keempat membuat rekapitulasi pajak kendaraan
- Kelima membuat atau menyusun, merencanakan kebutuhan barang milik daerah yang disebut dengan reka BMD.

4.Bagaimana proses pelaksanaan pelaporan aset pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

->Yaitu dengan melakukan penginputan barang yang sudah diadakan atau dibayar kedalam aplikasi SIMDA BMD, membuat laporan bulanan, triwulan, semester

dan tahunan pencairan barang milik daerah. Selanjutnya, membuat laporan awal, akhir dan tahun berjalan.

5. Apakah yang menjadi hambatan dalam proses implementasi pengelolaan aset Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

-> Jadi hambatan yang dialami oleh pengurus barang milik daerah yaitu:

- Pertama ketika pejabat atau pengurus melakukan pendataan ulang, ada barang yang berpindah tanpa sepengetahuan pengelola barang atau pengurus barang.
- Kedua adanya perubahan rencana kebutuhan barang milik daerah yang terkadang sudah direncanakan tahun sebelumnya namun pada saat tahun berkenaan, proses perencanaan tahun berjalan ada perubahan.

6. Apakah yang menjadi hambatan dalam implementasi pelaporan aset pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

-> Hambatannya yaitu dalam proses penginputan kedalam aplikasi SIMDA. Terkadang aplikasi yang digunakan mengalami masalah dan semestinya harus di upgrade atau hanya persoalan teknis.

7. Bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut dalam implementasi pengelolaan pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?

-> Yaitu dengan cara menyampaikan kepada seluruh pengguna barang agar melaporkan kepada pengurus barang ketika barang tersebut berpindah tangan atau orang yang terkait berpindah tugas.

8. Bagaimana mengatasi hambatan2 tersebut dalam implementasi pelaporan aset pada kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat?